

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350

Website : pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

Klungkung - Bali 80711





KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Semarang.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Semarang selama Tahun 2020 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP Mahkamah Agung RI.

Semarang, 26 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Semarang,

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.
NIP.19750717 199403 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2020 ini disusun. LKjIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visinya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Semarang yang Agung”.

Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2020. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 indikator kinerja dan 19 target kinerja

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat tiga Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 100\%$), yaitu Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sedangkan sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik ($\leq 100\%$), yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Semarang adalah **sebesar 70.86%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tabel Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90% 90%	95.95% 98.79%	106.61% 109.76%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5% 5%	-57.14% 85.7%	-1142% 1714%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 90%	96.50% 99.87% 99.76%	107.22% 110,96% 110.84%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10%	37.5%	375%

		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	80%	82,04%	102,55%
CAPAIAN SASARAN 1					168.04%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95%	100%	105.26%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7%	5.71%	81.57%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	100%	111,11%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
CAPAIAN SASARAN 2					74.49%
3.	Meningkatnya akses peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%

	bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	0%	0%	0%
CAPAIAN SASARAN 3					33.33%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	0,38%	7.6%
CAPAIAN SASARAN 4					7.6%
TOTAL CAPAIAN SASARAN					70.86%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR GRAFIK.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	5
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	12
A. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	12
B. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Capaian Sasaran Strategis.....	III
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang7	
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang.....9	
Tabel 4. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2020 13	
Tabel 5. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	16
Tabel 6. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2021	19
Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	21
Tabel 8. Persentase Penurunan Sisa Perkara	22
Tabel 9. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23
Tabel 10. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	25
Tabel 11. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	26
Tabel 12. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	27
Tabel 13. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	29
Tabel 14. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	29
Tabel 15. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	30
Tabel 16. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu.....	32
Tabel 17. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017-2020.....	34
Tabel 18. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2017-2020.....	34

Tabel 19. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus.....	36
Tabel 20. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.....	37
Tabel 21. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.....	38
Tabel 22. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.....	39
Tabel 23. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	40
Tabel 24. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	41
Tabel 25. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020.....	42
Tabel 26. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Klungkung.....	3
---	---



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2017-2020	18
Grafik 2. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2020	31
Grafik 3. Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2017-2020.....	37
Grafik 4. Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	42



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Semarang mempunyai visi : ***“Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung”***

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Semarang/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Semarang yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Semarapura membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. LKjIP itu sendiri merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Semarapura merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bali dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Semarapura bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Klungkung. Pengadilan Negeri Semarapura beralamat di Jalan Gajah Mada No. 59, Telp (0366) 21424, Fax (0366) 24350, *Website* : www.pn-semarapura.go.id , *E-Mail* : pnsrp@pn-semarapura.go.id

a. Letak Geografis

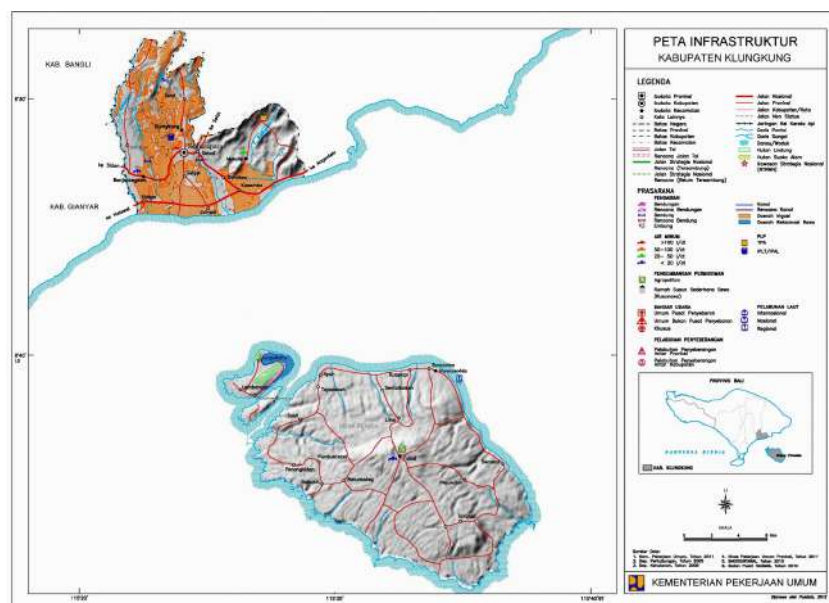
Kabupaten Klungkung adalah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, Kabupaten Klungkung memiliki batas-batas wilayah:

1.	Utara	115.21'28"	Bujur Timur
2.	Timur	115.37'43"	Bujur Timur
3.	Selatan	8.27'37"	Lintang Selatan
4.	Barat	8.49'00"	Lintang Selatan

Luas wilayah Klungkung 31.500 Ha dengan rincian :

Nusa Penida	20.941
Banjarangkan	4.573
Klungkung	2.905
Dawan	3.081

Ibukota Kabupaten: Semarapura



Gambar 1. Peta Kabupaten Klungkung

2. Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Negeri Semarapura merupakan lingkungan peradilan

umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Semarang sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum antara lain :

1. Tugas Pokok

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ;
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta;
- c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

2. Fungsi

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama ;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama serta administrasi peradilan lainnya ;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Semarang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Negeri Semarang yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi tahun Pertama dari Rencana Strategis 2020–2024 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Bali setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2020.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Semarang 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Semarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2020, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Semarang dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 -2024.

Rencana Strategis merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Semarang periode 2020-2024 yang bermuara

pada peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia peradilan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi sebagai berikut.

1) **Visi dan Misi**

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Semarang. Visi Pengadilan Negeri Negera mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah **”Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung”**.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Semarang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang ;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Semarang ;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Semarang.

2) **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95% 95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5% 5%

		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 95% 95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan	7%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
----	---	--	----

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Semarang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Semarang. Dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%

	Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95% 95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5% 5%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 95% 95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui	7%		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan	0%

		golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Semarang merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Semarang tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target

kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri dari 14 (empat belas) Indikator untuk 4 (empat) sasaran strategis, yang dinyatakan berhasil yaitu 10 (enam) indikator kinerja sedangkan sisanya 4 (empat) indikator kinerja perlu ditingkatkan di tahun tahun berikutnya. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan sesuai dengan Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata	90% 90%	95.95% 98.79%	106.61% 109.76%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5% 5%	-57.14% 85.7%	-1142% 1714%

		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	90% 90% 90%	96.50% 99.87% 99.76%	107.22% 110,96% 110.84%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10%	37.5%	375%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	80%	82,04%	102,55%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95%	100%	105.26 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7%	5.71%	81.57%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	100%	111,11 %

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	0%	0%	0%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	0,38%	7.6%

Analisis Capaian Kinerja Organisasi

$$* \text{ Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020, Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2020 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut.



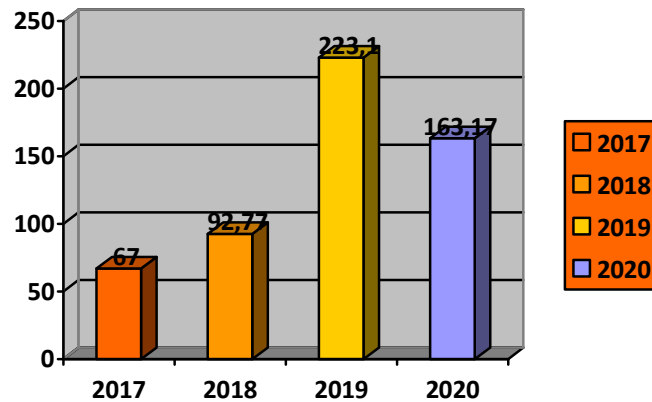
Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pengadilan Negeri merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja sesuai dengan Tabel 5.

Tabel 5. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%

dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	95.95%	106.61%
	- Perdata	90%	98.79%	109.76%
	- Pidana			
	c. Persentase penurunan sisa perkara:	5%	-57.14%	-1142%
	- Perdata	5%	85.7%	1714%
	- Pidana			
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	90%	96.50%	107.22%	
• Banding	90%	99.87%	110.96%	
• Kasasi	90%	99.76%	110.84%	
• PK				
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10%	42.85%	428.5%	
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap	80%	82,04%	102,55%	
CAPAIAN SASARAN 1				168.04%



Grafik 1. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2017-2020

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1- Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

a. Perdata

- 1) Secara akumulasi jumlah sisa perkara perdata (Gugatan dan permohonan) tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2020

sebanyak 18 perkara dari jumlah sisa perkara Perdata tahun 2018 sebanyak 18 perkara, sehingga persentase sisa Perkara Perdata tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2020 sebesar **100%**.

b. Pidana

- 1) Secara akumulasi jumlah sisa perkara Pidana (Biasa dan Anak) tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 14 perkara dari jumlah sisa perkara Pidana tahun 2017 sebanyak 14 perkara, sehingga persentase sisa Perkara Pidana tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2020 sebesar **100%**

Analisis Capaian

Apabila dijumlahkan secara keseluruhan jumlah sisa perkara Perdata dan Pidana tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 32 perkara dari jumlah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 32 perkara. Persentase indikator kinerja utama sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana) ditargetkan sebesar 100%, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarang maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100% atau hasil yang dicapai **sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** oleh karena sisa perkara tahun sebelumnya tidak terlalu banyak sehingga dapat diselesaikan semua di tahun berikutnya.

Tabel 6. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2017	Pidana	11	11	90%	100%	111%
	Perdata	14	14	90%	100%	111%
2018	Pidana	16	16	100%	100%	100%

	Perdata	21	21	100%	100%	100%
2019	Pidana	18	18	100%	100%	100%
	Perdata	14	14	100%	100%	100%
2020	Pidana	7	7	100%	100%	100%
	Perdata	7	7	100%	100%	100%

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$$

a. Perdata

- 1) Jumlah perkara perdata yang ada tahun 2020 sebanyak 272 perkara dengan rincian 7 Perkara yang belum putus di tahun 2019, dan 365 Perkara Masuk di 2020 jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2261 perkara, dan sisa perkara 2020 sebanyak 11 Perkara, berdasarkan

penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **95.95%**.

b. Pidana

- 1) Jumlah perkara pidana yang ada tahun 2020 sebanyak 83 perkara dengan rincian 7 Perkara yang belum putus di 2019 dan 77 Perkara masuk di tahun 2020 dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 82 perkara, sehingga sisa perkara di tahun 2020 sebanyak 1 Perkara, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **98.79%**.

Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2017	Pidana	110	94	100%	85,5%	85,5%
	Perdata	344	323	100%	93,8%	93,8%
2018	Pidana	99	85	90%	85,8%	95.3%
	Perdata	348	330	90%	94,8%	105.3%
2019	Pidana	106	99	90%	92.93%	104,29%
	Perdata	343	336	90%	96,73%	107,47%
2020	Pidana	83	82	95%	98.79%	103.98%
	Perdata	272	261	95%	95.95%	101 %

Analisis Capaian

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 343 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 355 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 96,61% % dan capaiannya sebesar 101.69%. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya karena jumlah perkara yang harus diselesaikan semakin banyak namun Berdasarkan persentase perbandingan

antara realisasi dengan target melebihi 95% atau hasil yang dicapai sudah memenuhi dari target yang ditetapkan.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3 : Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tabel 8. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2020	2019	2018	2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						
- Perdata	5%	-57,14%	-1142%	611,11%	25%	-90%
- Pidana	5%	85,7%	1714%	500,00%	1,4%	-100%

$$\text{Persentase Penurunan Perkara} = \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Catatan:

- Tn = Sisa perkara tahun berjalan
- Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

a. Perdata

1) Pada tahun 2020 jumlah sisa perkara Perdata sebanyak 11 perkara, sedangkan pada tahun 2019 jumlah sisa perkara sebanyak 7 perkara. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendaftaran perkara pada akhir tahun. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat peningkatan sisa perkara sebanyak 4 perkara. Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarang maka

realisasinya didapat sebesar -57.14% lebih kecil dari target realisasi sebesar 5%.

b. Pidana

- 1) Pada tahun 2020 jumlah sisa perkara Pidana sebanyak 1 perkara, sedangkan pada tahun 2019 jumlah sisa perkara sebanyak 7 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat penurunan sisa perkara sebanyak 6 perkara. Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarang maka realisasinya didapat sebesar 85,7% atau melebihi besar dari target realisasi sebesar 5%.

Analisis Capaian

Berdasarkan perhitungan penurunan sisa perkara, untuk perkara perdata terdapat peningkatan jumlah sisa perkara dari 7 perkara pada akhir tahun 2019 menjadi 11 Perkara pada tahun 2020 (-57.14%) untuk sisa perkara pidana mengalami penurunan perkara dari tahun 2019 sebanyak 7 Perkara menjadi 1 Perkara di tahun 2020 (85,71%), dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penurunan perkara perdata tidak mencapai target yang diinginkan, namun untuk perkara pidana telah melampaui target yang ditetapkan.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 9. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2017	417	16	401	90	106,7	103.24
2018	415	9	406	90	108,6	101.70
2019	435	10	425	90	97,70	108,56
2020	343	12	331	95	96.50	101.57

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding sebanyak 331 perkara dari jumlah perkara putus adalah sebanyak 443 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 96.50%, maka capaiannya adalah sebesar 101.57%. Capaian pada tahun 2020 meningkat meskipun jumlah perkara yang melakukan upaya hukum banding lebih besar dari tahun 2018 namun secara perbandingan perkara yang putus dengan yang mengajukan upaya hukum banding lebih besar

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 101.57% atau hasil yang dicapai **sudah memenuhi dari target yang ditetapkan.**

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 10. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2017	417	8	409	90%	98,1 %	109 %
2018	415	2	413	90%	99,5 %	110,5 %
2019	435	4	431	90%	99,08 %	110,09 %
2020	433	4	429	95%	99,07 %	104,28 %

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 429 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah 4 perkara, jumlah perkara putus adalah sebanyak 433 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 99,07%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 110,09% atau hasil yang dicapai **sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** walaupun capaian ini menurun dari tahun sebelumnya karena disebabkan karena menurunnya jumlah perkara yang di tangani pada tahun 2020.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 11. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2017	417	-	417	90%	100%	111%
2018	415	-	415	90%	100%	111%
2019	435	-	435	90%	100%	111%
2020	433	1	432	95%	99.76%	105.1%

Pada tahun 2020 jumlah perkara mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 1 Perkara dari jumlah perkara putus adalah sebanyak 433 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 99.76%,

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 105.1%, hasil yang **dicapai sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** Namun mengalami penurunan dari capaian tahun lalu karena pada tahun 2020 terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hokum peninjauan kembali.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5 : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA sebagai berikut.

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 12. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2017	3	0	50%	0	0
2018	4	1	50%	25%	50%
2019	12	6	10%	50.00%	500%

2020	7	3	10 %	42.85%	428.5%
------	---	---	------	--------	--------

Tahun 2020 jumlah perkara anak adalah sebanyak 7 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 3 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 42.85%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 428.5% atau hasil yang **dicapai melebihi dari target yang ditetapkan** yaitu capaian 10%.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-6 : Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN Semarang. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Semarang Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Pada tahun 2020 indikator Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan yang ditargetkan sebesar 80%. Pengadilan Negeri Semarang dalam Tahun 2020 melaksanakan dua kali survey dengan hasil survey pada Semester I Tahun 2020 sebesar 80,96% dengan jumlah responden 198 responden dan Pada Semester II Tahun 2020 sebesar 83,12 dengan jumlah responden 180 responden. Bila dirata-ratakan dari kedua hasil survey tersebut, Pengadilan Negeri Semarang, diperoleh angka Index Responden

Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan sebesar 82,04% atau telah memenuhi dari jumlah yang ditargetkan.

Tabel 13. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2017	100	70%	74,36%	92,95%
2018	100	70%	74,36%	92,95%
2019	378	80%	82,04%	102,55%
2020	216	80%	82.83%	103.53%

Analisis Capaian

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan dua kali melaksanakan survey yaitu pada semester I dengan jumlah responden 111 dengan nilai 82.16% dan pada survey semester II dengan jumlah responden 105 dengan nilai 83.49% jika di rata-ratakan nilai survey tahun 2020 adalah sebesar 82,83% dengan capaian 103.53 % atau hasil yang **dicapai telah memenuhi dari target yang ditetapkan.** Berdasarkan tabel indeks Kepuasan Masyarakat diatas dapat dilihat bahwa pencari keadilan semakin puas terhadap Pelayanan yang diberikan di Pengadilan Negeri Semarang.



Sasaran 2 : Peningkatan Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Pengadilan Negeri Semarang terus berupaya agar semua putusan yang dihasilkan pada Tahun 2020 dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

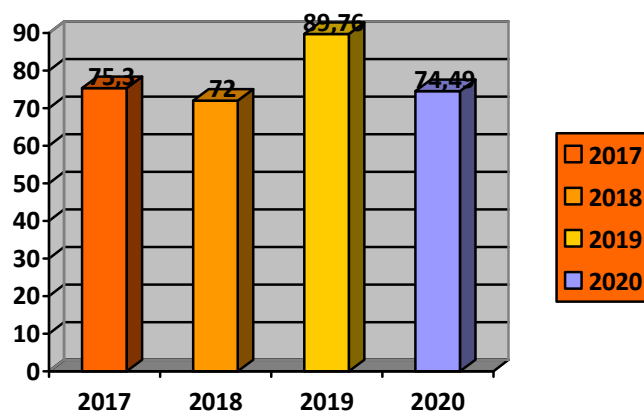
Tabel 14. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95%	100%	105.2%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7%	5.71%	74,07%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK	90%	100%	111,1%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
CAPAIAN SASARAN 2					74.49%

Tabel 15. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2017	2018	2019	2020
a. Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	105	105	105,2	105.2

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	0	74,07	74,07
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	111	111	111,1	111,1
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0	0	0	0



Grafik 2. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2020

Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian mengamali peningkatan dari tahun 2018 hal ini disebabkan pada tahun 2020 meningkatnya perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi

Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 16. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	417	417	90%	100%	111,1%
2018	415	415	90%	100%	111,1%
2019	417	417	90%	100%	111,1%
2020	343	343	95%	100%	105.2%

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 343 Perkara yang terdiri dari 82 perkara Pidana, dan 261 perkara Perdata dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 343 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %. Untuk jumlah perkara yang putus pada tahun 2017-2019 adalah gabungan perkara perdata dan pidana

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 105,2%, atau hasil yang **dicapai sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** walaupun capaian ini menurun dari tahun sebelumnya karena target yang ditetapkan dari tahun ke tahun semakin tinggi. Selain karena hal tersebut.

Sasaran 2 Indikator ke 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2017 semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 17. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017-2020

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2017	83	1	1%	1,2%	1,2%%
2018	28	0	30%	0%	0%
2019	27	3	10%	11.11%	111.1%
2020	35	2	7%	5.71 %	81.57%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 35 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 2 perkara, tidak berhasil sebanyak 30 perkara, pencabutan 1 perkara dan perkara mediasi masih berjalan sebanyak 2 perkara sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 11.11%, dengan capaian 111.1%

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 81.57% atau **hasil yang dicapai belum memenuhi dari target yang diinginkan**. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perkara yang dilakukan mediasi dari tahun sebelumnya dan jumlah perkara yang berhasil justru mengalami penurunan

Sasaran 2 Indikator ke 4 : Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Tabel 18. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2017-2020

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2017	9	9	90%	100%	111,11%
2018	11	11	90%	100%	111,11%
2019	14	14	90%	100%	111,11%
2020	17	17	90%	100%	111,11%

Tahun 2020 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 17 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 17 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 111,11%

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 111,11% atau **hasil yang dicapai sudah memenuhi dari target yang diinginkan**. Target pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu ini bisa tercapai oleh karena kedisiplinan seluruh pegawai dan pimpinan di Pengadilan Negeri Semarang dalam melaksanakan Tupoksi, selain itu juga karena telah disediakannya anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini.

Sasaran 2 Indikator ke 4 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 19. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 0 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0 %

Analisis Capaian

Di pengadilan Negeri Semarang di tahun 2020 tidak ada perkara tindak pidana korupsi karena perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan di Pengadilan Tipikor sehingga capaian adalah 0%.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

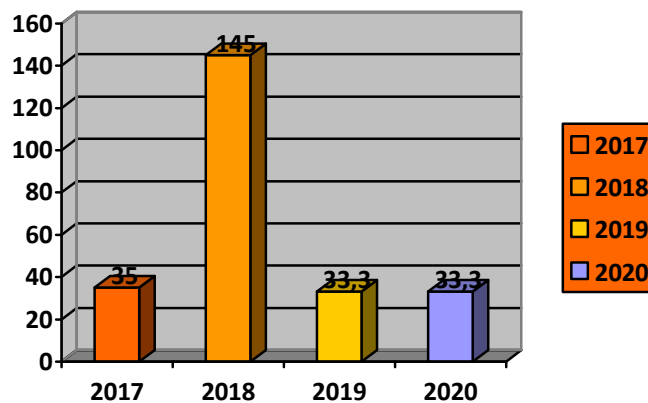
Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel 20. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0	0	0
Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan			33.3%



Grafik 3. Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2017-2020

Sasaran 3 Indikator ke 1 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 21. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	100%	0%	0%
2018	1	1	50%	100%	200%
2019	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%

Tahun 2020 tidak ada perkara yang diajukan secara prodeo sehingga ralisasi dan capaian di tahun 2020 sebesar 0%

Analisis Capaian

Pada tahun 2020 tidak ada perkara perdata yang diajukan secara prodeo, dan Pengadilan Negeri Semarang tidak mendapat alokasi anggaran untuk pendaftaran perkara prodeo

Sasaran 3 Indikator ke 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 22. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2017	13	13	100%	100%	100%
2018	24	24	100%	100%	100%
2019	60	60	100%	100%	100%
2020	4	4	100%	100%	100%

Analisis Capaian

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan sidang di luar Kantor pengadilan / zitting plaats sebanyak 4 Perkara. Perkara yang ada di

gedung Zetting Platz sudah diselesaika semua sehingga realisasinya sebesar 100% dan capaiannya 100%,

Sasaran 3 Indikator ke 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 23. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	100%	100%	100%
2018	1	1	100%	100%	100%
2019	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%

Tahun 2020 tidak ada jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar sehingga tidak ada pencari keadilan golongan tertentu secara otomatis tidak ada bantuan layanan hokum, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target, dimana Pengadilan Negeri Semarang tidak ada pencari keadilan golongan tertentu secara otomatis tidak ada bantuan layanan hukum.



Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

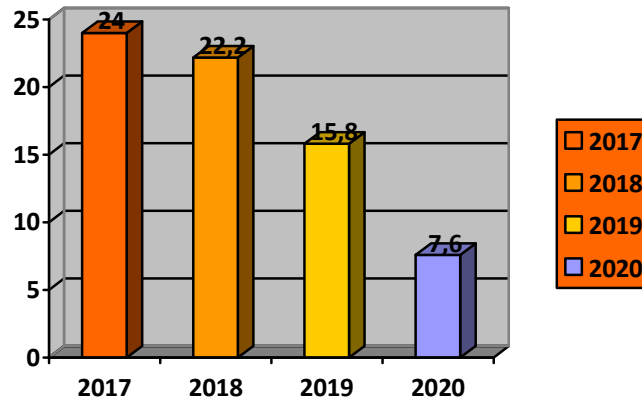
Tabel 24. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Eksekusi yang ditindaklanjuti	Jumlah perkara eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
2017	83	1	5%	1,2%	24%
2018	90	1	5%	1,11%	22.2%
2019	126	1	5%	0.79%	15.8%
2020	261	1	5 %	0.38%	7.6%

Tahun 2020 jumlah perkara gugatan yang BHT sebanyak 1261 Perkara dan jumlah perkara eksekusi yang ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara , maka realisasinya adalah sebesar 0.38% dengan nilai capaian 7.6 %. realisasi di tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan jumlah perkara yang BHT bertambah banyak.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target maka dapat dikatakan bahwa hasil yang dicapai sudah mencapai 7.6 % atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa untuk indikator kepatuhan terhadap putusan Pengadilan **belum memenuhi dari target yang diinginkan.**



Grafik 4. Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2017-2020

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Negeri Semarang tahun 2020 adalah sebesar 127.890.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Semarang per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 73.986.940,- atau sebesar 99.85%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan dengan adanya pengembalian belanja untuk pelaksanaan siding di luar gedung pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan karena ada adanya pandemic covid 19. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 25. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
----	-------	---------------	----------------	---

1	2017	100.957.000,-	99.716.090,-	98,77
2	2018	89.994.000,-	88.729.400,-	98,59
3	2019	127.890.000,-	127.729.540,-	99,87
4	2020	74.100.000,-	73.986.940,-	99,85

Realisasi sebesar Rp.73.986.940,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	35.600.000,-	35.525.500,-	99,79
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	6.400.000,-	6.361.440,-	99,39
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	8.100.000,-	8.100.000,-	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	0	0	0



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Semarang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan Umum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Pengadilan Negeri Semarang telah berupaya untuk mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020, namun pada kenyataannya tidak semua target indikator kinerja utama dapat tercapai dengan baik, ada beberapa kendala yang menghambat tercapainya target tersebut, seperti Banyaknya pendaftaran perkara gugatan ataupun permohonan yang masuk pada akhir tahun.

B. Saran-saran

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk masa yang akan datang, diperlukan :

1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung, dan belanja modal untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan Negeri Semarang

2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Peradilan Umum, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Bali secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis.
3. Peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, sopan dan transparan.
4. Mempermudah proses perkara gugatan ataupun permohonan yang pihaknya berada di pulau nusa penida dengan melaksanakan sidang di gedung zetting platz Pengadilan Negeri Semarang.



LAMPIRAN 1
SK TIM PENYUSUN LKJIP



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada Nomor 59, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350

Semarang 80711

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR : W24-U3/ 130 /KP.01.2/1/2021

TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor W24-U/08/OT.01.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2020;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2020 perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang ini, dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
- Pertama** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Semarang ;
- Kedua** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;
- Ketiga** : Setelah selesai melaksanakan tugas, tim kerja melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;
- Keempat** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 Januari 2021

↓ KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA


PUTU ENDRU SONATA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR : W24-U3/130 /KP.01.2/1/2021
TANGGAL 8 Januari 2021
TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

1. Pembina : - Ketua
- Wakil Ketua
2. Penanggung jawab : - Panitera
- Sekretaris
3. Koordinator : - Panitera Muda Perdata
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Hukum
- Kasub. Bag. Umum dan Keuangan
- Kasub. Bag. Kepegawaian, Ortala
- Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
4. Anggota : - Pelaksana/yang diperbantukan pada setiap bagian kepaniteraan dan kesekretariatan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 Januari 2021

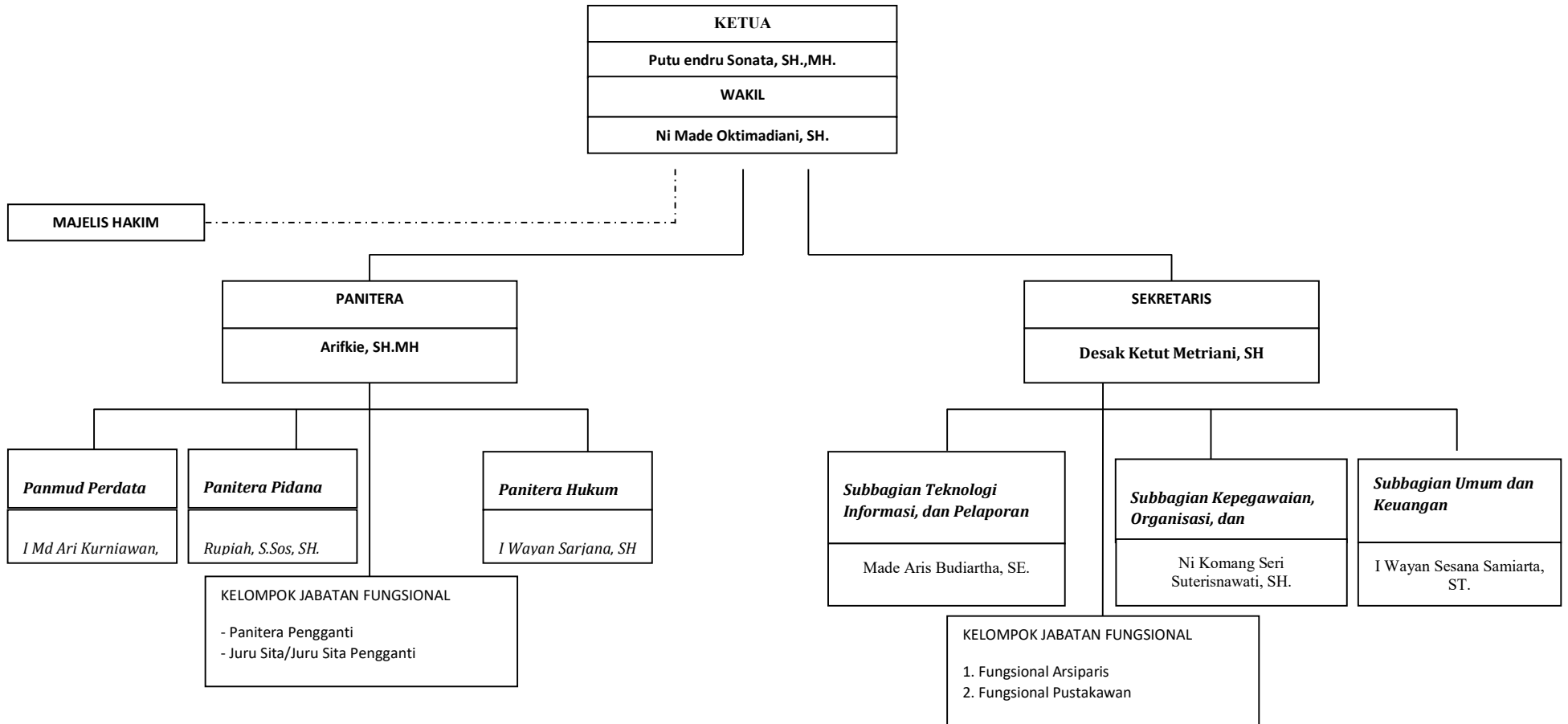
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA


PUTU ENDRU SONATA



LAMPIRAN 2
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015





LAMPIRAN 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350

Website : pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

Klungkung - Bali 80711



SALINAN

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada Nomor 59, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350

Semarang 80711

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR : W24-U3/2417/KP.01.2/12/2019
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Semarang perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Semarang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Semarang 2015 - 2019;
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menelaraskan isu - isu strategis di Pengadilan Negeri Semarang agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

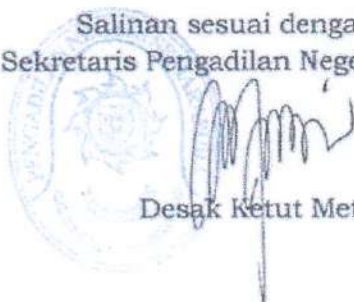
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
↳ Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang

PUTU ENDRU SONATA



Desak Ketut Metriani

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>b. Persentase perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tn = Sisa perkara tahun berjalan • Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya • Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi dan PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan • Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Panitera
Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

Catatan:

- Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Catatan :

pidana : Isi putusan = salinan putusan dan kutipan putusan perdata : salinan putusan atas permintaan dan kutipan putusan pada pihak yang tidak hadir

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

	<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap <u>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK</u> x 100%</p> <p>Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A</p>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website <u>Jumlah perkara Tipikor yang diputus</u> x 100%</p> <p>Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor</p>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan <u>Jumlah Perkara Prodeo</u> x 100%</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan <u>Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

luar kantor pengadilan (*zetting plaats*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100%</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (majinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</p> <p>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap





LAMPIRAN 4
REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



LAMPIRAN

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 Matrik Reviu Rencana Strategis Pengadilán Negeri Semarang TAHUN 2020-2024

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung.

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi								
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019	Anggaran				
		%											Jumlah	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pencapaian urusan peradilan yang selesai tepat waktu dan kepuasan masyarakat	80%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana b. Persentase	90%	92%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkembangan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	75	42.000.000	40.095.000	40.095.000	40.095.000	40.095.000	40.095.000

2	Setiap pencaharian keadilan akan dapat dijalankan	a. Persentase perkaraprodeo yang diselesaikan b. Persentase perkarayang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	dalam waktu 1 hari setelah diputus	0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%	0% 0% 100% 100%	0% 0% 100% 100%	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan Perkara peradilan yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	- - - - - - - -	- - - - - - - -
---	---	---	----	--	------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------



LAMPIRAN 5
RENCANA KINERJA TAHUN 2020



LAMPIRAN

5. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	95%	131.000.000
		- Perdata	100%					
		- Pidana	100%					
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				Layanan Perkantoran	95%	4.996.647.000	
		- Perdata	95%					
		- Pidana	95%					
	c. Persentase penurunan sisa Perkara			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana Prasarana Lingkungan Mahkamah Agung di	Layanan Internal (Overhead)	100%	25.000.000
		- Perdata	5%					
		- Pidana	5%					

		<p>d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding 95% • Kasasi 97% • PK 99% <p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi 10%</p>		<p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<p>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<p>Pos Bantuan Hukum 100%</p>	<p>24.000.000</p>
	<p>2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 80%</p>			<p>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu</p>	<p>100%</p>	<p>89.000.000</p>
		<p>a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak tepat waktu. 95%</p>			<p>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 7%</p>					



LAMPIRAN 6
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350

Website : pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

Klungkung - Bali 80711



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Endru Sonata, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Semarang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H.



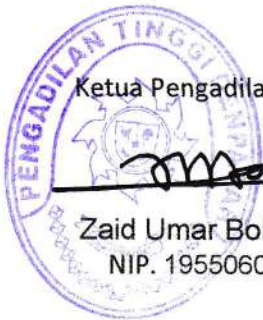
Semarang, 2 Januari 2020
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 95% 95% 5% 5% 95% 95% 95% 10% 80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	95% 7% 90% XX
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 100% 0
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	5%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.021.647.000,-
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 131.000.000,-



Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Zaid Umar Bobasaid, S.H., M.H
NIP. 19550606 198203 1006



Semarang, 2 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.
NIP. 19770416 200012 1 001



LAMPIRAN 7
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 PER BULAN



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN JANUARI TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari			Realisasi s.d Bulan Januari				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	7	2	28,57	28,00	7	2	28,57	28,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	7	6	85,71	85,00	7	6	85,71	85,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	20	20	100,00	105,26	20	20	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	8	8	100,00	105,26	8	8	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	1	1	100,00	1.000,00	1	1	100,00	1.000,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	20	20	100,00	105,26	20	20	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	8	8	100,00	105,26	8	8	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	4	0	0,00	0,00	4	0	0,00	0,00
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	5	5	100,00	100,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			77,44	8,89	7,78	79,37	102,48	8,89	7,78	79,37	102,48



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari			Realisasi s.d Bulan Februari				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	5	0	0,00	0,00	12	2	16,67	16,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	1	100,00	100,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	10	10	100,00	105,26	30	30	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	4	4	100,00	105,26	12	12	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	2	1	50,00	500,00	3	2	66,67	660,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	10	10	100,00	105,26	30	30	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	4	4	100,00	105,26	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	4	0	0,00	0,00	8	0	0,00	0,00
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	2	2	100,00	111,11	2	2	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	1	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			69,20	4,30	3,20	65,00	93,93	11,18	9,27	70,08	97,33



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN MARET TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret			Realisasi s.d Bulan Maret				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	5	1	20,00	20,00	17	3	17,65	17,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	21	21	100,00	105,26	51	51	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	9	9	100,00	105,26	21	21	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	12	12	100,00	105,26	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00		32	0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	1	1	100,00	1.000,00	4	3	75,00	750,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00		100	0,00	0,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	21	21	100,00	105,26	51	51	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	9	9	100,00	105,26	21	21	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	1	0	0,00	0,00	9	0	0,00	0,00
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	0	0	0,00	0,00	2	2	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			74,00	9,88	9,25	77,50	104,73	16,83	14,67	73,35	99,23



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	4	3	75,00	75,00	21	6	28,57	28,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	23	23	100,00	105,26	74	74	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	4	4	100,00	105,26	25	25	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	0	0	0,00	0,00	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00		32	0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	1	0	0,00	0,00	5	3	60,00	600,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00		100	0,00	0,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	23	23	100,00	105,26	74	74	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	4	4	100,00	105,26	25	25	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	1	0	0,00	0,00	10	0	0,00	0,00
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	1	1	100,00	111,11	3	3	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			73,38	7,63	7,25	71,88	97,96	21,92	19,50	73,01	98,77



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN MEI TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei			Realisasi s.d Bulan Mei				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	1	0	0,00	0,00	22	6	27,27	27,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	18	18	100,00	105,26	92	92	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	11	11	100,00	105,26	36	36	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	0	0	0,00	0,00	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00		32	0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	0,00	5	3	60,00	600,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00		100	0,00	0,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	18	18	100,00	105,26	92	92	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	11	11	100,00	105,26	36	36	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	2	1	50,00	714,29	12	1	8,33	114,29
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	0	0	0,00	0,00	3	3	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			81,17	10,17	9,83	75,00	92,40	27,00	24,42	73,59	99,56



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN JUNI TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	1	1	100,00	100,00	23	7	30,43	30,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	27	27	100,00	105,26	119	119	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	43	43	100,00	105,26	79	79	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	0	0	0,00	0,00	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00		32	0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	0,00	5	3	60,00	600,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	100	100	100,00	125,00	100	100	100,00	125,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	27	27	100,00	105,26	119	119	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	43	43	100,00	105,26	79	79	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	7	0	0,00	0,00	19	1	5,26	71,43
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	0	0	0,00	0,00	3	3	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			81,00	35,43	34,43	85,71	105,82	44,00	41,08	75,63	101,68



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN JULI TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli			Realisasi s.d Bulan Juli				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	23	7	30,43	30,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	26	26	100,00	105,26	145	145	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	5	5	100,00	105,26	84	84	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	0	0	0,00	0,00	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00		32	0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	0,00	5	3	60,00	600,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00	100	100	100,00	125,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	26	26	100,00	105,26	145	145	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	5	5	100,00	105,26	84	84	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	4	0	0,00	0,00	23	1	4,35	57,14
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	0	0	0,00	0,00	3	3	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			77,40	13,20	12,40	80,00	103,36	49,08	45,85	75,56	101,58



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus			Realisasi s.d Bulan Agustus				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	23	7	30,43	30,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	24	24	100,00	105,26	169	169	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	296	296	100,00	105,26	380	380	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	0	0	0,00	0,00	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00		32	0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	0,00	5	3	60,00	600,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00	100	100	100,00	125,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	24	24	100,00	105,26	169	169	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	296	296	100,00	105,26	380	380	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	5	0	0,00	0,00	28	1	3,57	42,86
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	0	0	0,00	0,00	3	3	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			77,40	129,00	128,00	80,00	103,36	98,69	95,08	75,50	101,50



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September			Realisasi s.d Bulan September				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	23	7	30,43	30,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	24	24	100,00	105,26	193	193	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	155	155	100,00	105,26	535	535	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	527	527	100,00	105,26	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00		32	0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	0,00	5	3	60,00	600,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00	100	100	100,00	125,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	24	24	100,00	105,26	193	193	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	155	155	100,00	105,26	535	535	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	5	0	0,00	0,00	33	1	3,03	42,86
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	2	2	100,00	111,11	5	5	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			81,71	127,43	126,71	85,71	104,90	126,77	122,77	75,46	101,44



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober			Realisasi s.d Bulan Oktober				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	23	7	30,43	30,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	22	22	100,00	105,26	215	215	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	10	10	100,00	105,26	545	545	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	0	0	0,00	0,00	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00		32	0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	0,00	5	3	60,00	600,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00	100	100	100,00	125,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	22	22	100,00	105,26	215	215	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	10	10	100,00	105,26	545	545	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	5	0	0,00	0,00	38	1	2,63	28,57
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	1	1	100,00	111,11	6	6	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			79,50	11,67	10,83	83,33	104,82	132,15	127,77	75,43	101,40



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN NOVEMBER TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan November			Realisasi s.d Bulan November				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	23	7	30,43	30,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	30	30	100,00	105,26	245	245	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	7	7	100,00	105,26	552	552	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	0	0	0,00	0,00	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	0	0	0,00	0,00		32	0,00	0,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	1	1	100,00	1.000,00	6	4	66,67	660,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0,00	100	100	100,00	125,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	30	30	100,00	105,26	245	245	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	7	7	100,00	105,26	552	552	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	0	0	0,00	0,00	38	1	2,63	28,57
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	3	3	100,00	111,11	9	9	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			80,00	13,00	13,00	100,00	125,00	138,15	133,77	75,94	102,09



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember			Realisasi s.d Bulan Desember				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	23	7	30,43	30,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	8	7	87,50	87,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	25	25	100,00	105,26	270	270	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	8	8	100,00	105,26	560	560	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang	95	32	31	96,88	101,05	12	12	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	32	31	96,88	101,05	32	31	96,88	101,05
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	32	32	100,00	105,26	32	32	100,00	105,26
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	1	1	100,00	1.000,00	7	5	71,43	710,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	100	100	100,00	125,00	100	100	100,00	125,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	23	23	100,00	105,26	268	268	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	95	9	9	100,00	105,26	561	561	100,00	105,26



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu									
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	4	0	0,00	0,00	42	1	2,38	28,57
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	2	2	100,00	111,11	11	11	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	5	5	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			77,45	24,36	23,82	90,34	116,64	128,80	124,67	79,24	102,73



LAMPIRAN 8
LAPORAN PERKARA

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

Januari - Desember 2020

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	7	3	10	6	0	6	0	0	4	21	16
2	Februari	4	8	12	3	3	3	0	0	9	17	16
3	Maret	9	4	13	9	0	9	0	0	4	19	16
4	April	4	5	9	4	3	4	0	0	5	18	11
5	Mei	5	9	14	7	0	7	0	0	7	29	20
6	Juni	7	2	9	8	0	8	0	0	1	15	13
7	Juli	1	12	13	3	0	3	0	0	10	25	20
8	Agustus	10	2	12	4	0	4	0	0	8	37	27
9	September	8	10	18	6	1	6	0	0	12	49	36
10	Oktober	12	4	16	10	1	10	0	0	6	46	34
11	November	6	7	13	4	1	4	0	0	9	22	18
12	Desember	9	0	9	8	1	8	0	0	1	18	14
Total			66		72		72				316	241



Semarang, 20 Januari 2021

Panitera

ARIKIE, S.H., M.H.
NIP. 198009272002121002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2020**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	2	2	1	1	1	1	0	1	3	2
3	Maret	1	0	1	1	1	1	1	0	0	2	2
4	April	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		3	3	3		3				6	5



Semarang, 20 Januari 2021

Panitera

ARIFIE, S.H., M.H.
NIP.198009272002121002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA CEPAT
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2020**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK BULAN INI	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	2	2	2	0	2	2	0	0	4	2
2	Februari	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
3	Maret	0	2	2	2	0	2	2	0	0	4	2
4	April	0	3	3	3	0	3	3	0	0	5	5
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	2
7	Juli	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	2
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1
	Total		11	11	11		11	11			20	15



Semarang, 20 Januari 2021

Panitera

ARIFIE, SH., MH.
NIP. 198009272002121002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA SINGKAT
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2020**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Semarang, 20 Januari 2021

Panitera

ARIEKIE, S.H., M.H.
NIP.198009272002121002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2020**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	
		BELUM PUTUS	PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	6	0	0	12	18	2	7	0	2	0	0	2	0	2	0	16
2	Februari	16	0	0	4	20	2	11	0	2	0	0	2	0	2	0	18
3	Maret	18	0	0	8	26	11	7	0	1	0	0	11	0	11	0	15
4	April	15	0	0	9	24	12	7	0	1	0	0	12	0	12	0	12
5	Mei	12	0	0	11	23	7	7	0	1	0	0	7	0	7	0	16
6	Juni	16	0	0	15	31	11	6	0	7	0	1	11	0	11	0	19
7	Juli	20	0	0	9	29	13	3	0	2	0	0	13	0	13	0	16
8	Agustus	16	0	0	11	27	7	6	0	5	0	0	7	0	8	-1	19
9	September	20	-1	0	9	28	12	2	0	2	0	0	11	0	12	-1	16
10	Oktober	17	-1	0	10	26	13	1	0	2	0	0	12	0	12	0	14
11	November	14	0	0	13	27	11	3	0	3	0	0	11	0	11	0	16
12	Desember	16	0	0	10	26	15	2	0	3	0	0	15	0	15	0	11
TOTAL					121		116		0	31	0	1			116		



Semarang, 20 Januari 2021

Panitera

ARIKIE, S.L., M.H.
NIP. 198009272002121002

Export Excel

**LAPORAN REKAPITULIASI PERKARA GUGATAN SEDERHANA
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
2020**

No	Periode	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Diputus	Status Penyelesaian Perkara			Jenis Kelamin		
				Akta Perdamaian	Penetapan Dismisil	Penetapan Gugur	Putusan	Laki - Laki	Perempuan
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	1	-	-	-	-	1	1	-
4	April	1	1	-	-	-	1	1	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	1	-	-	-	1	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2	2	-	-	-	2	2	2



Semarang, 20 Januari 2021

Panitera

ARIKIE,SH.,MH.
NIP. 198009272002121002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

Januari - Desember 2020

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	
		BELUM PUTUS	PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	1	0	0	20	21	18	0	0	0	0	1	18	0	18	0	2
2	Februari	3	0	0	9	12	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0	4
3	Maret	4	0	0	11	15	10	0	0	0	0	0	10	0	10	0	5
4	April	5	0	0	8	13	10	0	0	0	0	0	10	0	10	0	3
5	Mei	3	0	0	13	16	11	0	0	0	0	0	11	0	11	0	5
6	Juni	5	0	0	13	18	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0	3
7	Juli	3	0	0	16	19	13	0	0	0	0	0	13	0	13	0	6
8	Agustus	6	0	0	16	22	16	0	0	0	0	0	16	0	16	0	6
9	September	6	0	0	6	12	12	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0
10	Oktober	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0
11	November	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	0	13	0	13	0	4
12	Desember	4	0	0	4	8	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0
TOTAL					142		143		0	0	0	1			143		



Semarang, 20 Januari 2021

Panitera

ARIKIE.S.H.,MH.
NIP. 198009272002121002

No	Klasifikasi Per Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi		Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi							Berhasil		Tidak Berhasil		Mediasi Berjalan			
		Sisa Tahun Berjalan	Total Tahun Berjalan	Akta Perdamaian / Putusan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jual Beli Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewa Menyewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jual Beli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Warisan/Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perceraian	-	23	23	-	-	-	1	4%	1	4%	21	91%	-	-	1	4%	-
6	Harta Bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gadai/Hipotik/Fiducia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Perseroan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Hak Ulayat/Persekutuan Adat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penyalahgunaan Hak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Perbuatan Melawan Hukum	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-
14	Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Objek Sengketa Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Wanprestasi	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	100%	-	-	-	-	-
18	Perbuatan Melawan Hukum	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	6	75%	-	-	2	25%	-
19	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Objek Sengketa Bukan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Wanprestasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Leasing/Sewa Beli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Perkara Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi

No	Klasifikasi Per Jenis Perkara	Sisa Tahun Berjalan	4	5	6	7	Akta Perdamaian / Putusan		Berhasil Sebagian		Total Berhasil		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan		Mediasi Berjalan	
							Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Anjak Piutang/Cessie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Perjanjian Barangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Yayasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Jual Gadai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sewa Menyewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Jual Gadai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Harta Bersama	-	1	1	1	100%	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
32	Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Penyerobotan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Sertifikat/Girik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Hak Asuh Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Pembatalan Arbitrase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	KPPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	BPSK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Pencemaran Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Perkara Mediasi Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi Berhasil

No	Klasifikasi Per Jenis Perkara	Sisa Tahun Berjalan Lulu	4	5	6	7	Akta Perdamaian / Putusan		Berhasil Sebagian		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan		Mediasi Berjalan	
							Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1																
44	Pencemaran Udara dan Gangguan (Kebisingan,Getaran dan Kebauan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Pencemaran Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Pencemaran Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Kerusakan Terumbu Karang, Hutan Bakau (Mangrove), Lautan dan Pesisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Penebangan Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Perubahan Kawasan Alam/Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Tanaman Yang Dilindungi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan															
52	Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Reklamasi Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Pembuangan Limbah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Perkara Mediasi Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi Berhasil

No	Klasifikasi Per Jenis Perkara	Sisa Tahun Berjalan	Total Mediasi	Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan		Mediasi Berjalan							
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	Penangkapan Ikan (dengan racun, bahan peledak/bom ikan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Perubahan iklim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Gugatan Terhadap Aktifis Lingkungan Hidup/Warga/Masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Satwa Liar (Penangkapan,Perdagangan dll)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Keberatan atas ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Perkara Mediasi
 Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi

No	Klasifikasi Per Jenis Perkara	Sisa Tahun Berjalan	4	5	6	7	Akta Perdamaian / Putusan		Berhasil Sebagian		Berhasil		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan		Mediasi Berjalan	
							Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
66	Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	35	35	1	3%	-	-	1	3%	2	6%	30	86%	-	-	3	9%



Semarang, 20 Januari 2021

Panitera

ARIEKIE, S.L., M.H.
 NIP. 198009272002121002